



KRITIK SOSIAL DALAM PUISI “PIDATO SEORANG DEMONSTRAN” KARYA MANSUR SAMIN (TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA)

*Social Criticism in the Poem “Pidato Seorang Demonstran”
by Mansur Samin (A Review of Literary Sociology)*

Moch. Fachrul Mustika¹, Jumiati Lantra², M. Nurzin R. Kasau³

^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidenreng
Rappang

Pos-el: fchrlmhmd13@gmail.com¹

Article Info

Article history: Received
25 November 2023

Revised
10 Februari 2024

Accepted
31 Maret 2024

Keywords:
*literary sociology,
Mansur Samin, social
criticism,
speech of a demonstrator*

Abstract

This research uses a research type and design based on a literary approach. Literary research is an effort to search for knowledge and give meaning to literary problems carefully and critically. This research applies a qualitative approach with an emphasis on the characteristics of the data. The research design used is descriptive qualitative to understand phenomena holistically through descriptions in the form of words and language. The sociology of literature approach is adopted, focusing on the societal aspects in literary works, considering them as the author's response to social reality. The focus of the research is on the poem "Puisi Seorang Demonstran" by Mansur Samin and the author's response to social problems expressed through criticism. Primary data was obtained from the poem, while secondary data involved various related documents and scientific literature on study methods and literary sociology theories. A literature review approach was used in data collection through articles, academic reports, theses, and books. Data analysis was conducted using the content analysis method, focusing on identifying and interpreting the core message of literary works. The results concluded that the poem "Puisi Seorang Demonstran" reflects the background of political change, economic instability, and people's discontent during that time. The social criticism in this poem includes abuse of power, economic, political, and human rights issues. The critique addresses military repression, economic inequality, the behavior of political leaders, and human rights violations. The poem becomes a voice that reflects the socio-political conditions of Indonesia at that time and provides a perspective on the aspirations and discontent of the people.

PENDAHULUAN

Manusia menjalani berbagai pengalaman sepanjang hidupnya, dan peristiwa-peristiwa ini muncul dari aktivitas dan tindakan yang dilakukan dalam lingkungannya. Ini memberikan materi untuk pengarang menciptakan karya sastra, di mana pengarang dapat merenungkan dan menginterpretasikan pengalaman tersebut. Untuk menciptakan narasi kehidupan manusia yang kuat dalam karya sastra, penting bagi pengarang untuk mengamati peristiwa dengan cermat dan merasakan setiap pengalaman. Karya sastra adalah wadah di mana pengarang dapat mengekspresikan pemikiran, pandangan, dan wawasan mereka tentang makna yang mendalam. Sastrawan juga memanfaatkan karyanya untuk mengekspresikan esensi kehidupan manusia yang mencakup pengalaman pertemuan, perasaan, dan interpretasi pribadi. Melalui karya sastra, pengarang dapat menghadirkan makna dalam peristiwa kehidupan manusia, memperkaya kisah-kisah mereka, dan menyampaikan pesan-pesan yang lebih dalam kepada pembaca.

Karya sastra yang memiliki keaslian dan nilai estetika yang tinggi dapat membangkitkan perasaan serta imajinasi. Dalam karya sastra dengan kualitas tersebut, seorang pengarang tidak hanya mereproduksi peristiwa sehari-hari, tetapi juga melakukan *brainstorming* dengan berbagai konsep, ide, pemikiran, dan keadaan sosial yang dialami. Pengarang tidak lepas dari pengaruh masyarakat dalam menciptakan karya sastra, karena ia merupakan anggota masyarakat yang tidak terlepas dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki serta cermin dari budaya tempat ia tinggal. Sastra dan kehidupan merupakan dua fenomena sosial yang saling melengkapi. Karya sastra tidak hanya memiliki kualitas estetika tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial yang berfungsi sebagai alat pendidikan atau sumber pengetahuan (Endraswara, 2021).

Puisi merupakan jenis karya yang kuat dalam menyampaikan kritik sosial dengan menggambarkan realitas sosial di sekitar pengarang. Sebagai media reflektif, puisi mencerminkan realitas sosial-ekonomi yang merangsang pembaca untuk refleksi tentang kehidupan. Pemikiran pengarang tecermin dari situasi sosial yang dialami (Krisna & Qur'ani, 2021). Pengartikulasian pikiran dan emosi penyair melalui bahasa puitis dengan simbol-simbol kreatif menjadi daya tarik unik puisi (Simanjuntak, Saragih, & Sirait, 2022). Sebagai genre sastra, puisi mampu mendokumentasikan dan mentransformasikan pengalaman manusia menjadi media artistik yang memperkaya nilai-nilai kehidupan. Puisi adalah salah satu bentuk komposisi sastra yang memungkinkan ekspresi imajinasi dan kreativitas pengarang (Anwarsani dkk., 2023). Puisi juga menjadi wadah untuk mengomunikasikan emosi, termasuk kritik terhadap orang lain, secara terselubung dan efektif, menjaga kebebasan berekspresi dan perbedaan pendapat.

Pengarang, sebagai bagian dari masyarakat, menyampaikan pendapat dan tanggapannya melalui puisi dengan cara yang bermakna. Eksplorasi terhadap realitas sosial mencakup tema-tema ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan isu-isu sosial lainnya yang dikomunikasikan melalui lensa kritik sosial (Indrastuti, 2019). Kritik sosial, sebagai salah satu pendekatan untuk mengungkap kondisi sosial saat karya sastra dibuat, menyoroti ketimpangan sosial yang bertentangan dengan sistem nilai yang berlaku. Ketimpangan sosial tersebut umumnya menyebabkan berbagai masalah sosial yang menimbulkan tantangan dan perpecahan di masyarakat (Abubakar, Muthi'ah, & Tsuraya, 2022; Laili & Qurani, 2022).

Masalah sosial, sebagai gejala yang disebabkan oleh aspek-aspek sosial yang tidak berjalan secara efektif, dapat menimbulkan kesulitan sosial dan gangguan dalam kehidupan sosial. Penggunaan karya sastra, terutama puisi, sebagai sarana ekspresi telah memungkinkan individu untuk mengekspresikan kritik dan perlawanan terhadap penguasa yang menindas dan pemimpin yang tidak sesuai dengan standar masyarakat. Karya sastra juga dapat membentuk

modus wacana kritik sosial sebagai mekanisme untuk memfasilitasi operasi sistem sosial atau proses sosial dalam masyarakat tertentu (Krisna & Qur'ani, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, puisi "Pidato Seorang Demonstran" karya Mansur Samin merupakan sebuah kritik sosial yang sarat dengan protes sosial politik, terinspirasi dari situasi yang dialami rakyat Indonesia pada tahun 1960-an. Dalam puisi tersebut, Samin menggambarkan dengan fasih perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh militer, kesewenang-wenangan pemerintah, dan penderitaan yang dialami rakyat pada masa itu. Karya tersebut juga memperlihatkan betapa masalah sosial, politik, dan ekonomi saling terkait. Mansur Samin, seorang pengarang, penyair, dan pemain teater asal Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, telah menggunakan karya-karyanya untuk mengkritik kesenjangan sosial ekonomi yang disebabkan oleh praktik politik dan ekonomi Orde Lama. Peristiwa tersebut dapat terlihat dalam puisi "Pidato Seorang Demonstran" yang ditulis pada tahun 1966 dan dapat ditemukan dalam bukunya "Perlawanan (1971)". Puisi ini merinci peristiwa-peristiwa penting pada tahun 1960-an di Indonesia. Salah satu peristiwa yang diangkat ialah protes mahasiswa di Gedung Sekretariat Negara pada 23 Februari 1966, yang berujung pada kematian mahasiswa termasuk Arief Rachman Hakim, yang dianggap sebagai pahlawan AMPERA pada masa itu.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji masalah kritik sastra dan kritik sosial dengan menggunakan berbagai judul novel yang relevan. Penelitian oleh Hajrawati (2017) berjudul "Aspek Sosial Dalam Naskah Drama Bulan dan Kerupuk Karya Yusef Muldiyana (Kajian Sosiologi Sastra Ian Watt)" menyoroti bagaimana Yusef Muldiyana mengangkat isu-isu sosial dalam karya dramanya. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa drama *Kerupuk* karya Yusef Muldiyana menunjukkan kesenjangan sosial yang tajam. Penelitian Kholis (2021) berjudul "Kritik Sosial Dalam 4 Puisi Anis Syusan (Kajian Sosiologi Sastra Alan Swingewood)" menemukan bahwa puisi Anis Syusan mencerminkan kondisi negara Tunisia; mengkritik berbagai masalah seperti korupsi dan ketimpangan sosial. Sementara itu, penelitian oleh Rohma & Qur'ani (2022) tentang "Kritik Sosial dalam Puisi "Beri Aku Keadilan" Karya Fitri Nganthi Wani dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sastra" mengungkapkan bahwa puisi tersebut menjadi cermin dari kekacauan dalam keluarga pada masa Orde Baru. Meskipun ketiga penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian, seperti pada objek penelitian dan teori yang digunakan. Misalnya, penelitian ini memfokuskan pada kritik sosial dalam puisi dengan teori Ian Watt, sementara penelitian Hajrawati lebih menekankan pada aspek sosial dalam naskah drama dengan pendekatan yang serupa. Demikian pula, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian lain dalam penggunaan pendekatan sosiologi sastra tetapi memiliki perbedaan dalam objek penelitian dan teori yang diterapkan.

Penelitian ini mengkaji puisi Pidato Seorang Demonstran dengan judul "Kritik Sosial dalam Puisi "Pidato Seorang Demonstran" Karya Mansur Samin (Tinjauan Sosiologi Sastra). Fokus penelitian ini yaitu mengeksplorasi tema kritik sosial dalam puisi tersebut. Penelitian ini berada di bawah lingkup tinjauan literatur dalam bidang sosiologi sastra. Penyertaan kritik sosial terhadap kesewenang-wenangan pemerintah dalam puisi "Pidato Seorang Demonstran" karya Mansur Samin merupakan aspek yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Puisi "Pidato Seorang Demonstran" karya Mansur Samin layak untuk diteliti karena belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti berbagai aspek dari puisi ini. Selain itu, penelitian ini berusaha menyoroti kontribusi Mansur Samin bagi kesusastraan Indonesia, meskipun kurang terkenal di kalangan masyarakat umum dibandingkan dengan penulis Angkatan 66 lainnya, seperti Taufik Ismail dan W.S. Rendra.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis dan desain penelitian yang didasarkan pada pendekatan penelitian sastra. Penelitian sastra merupakan upaya pencarian pengetahuan dan pemberian makna dengan hati-hati dan kritis terhadap masalah sastra (Semi, 1993). Fokus penelitian sastra adalah memahami aspek kemanusiaan dan kebudayaan yang terdapat dalam karya sastra. Dalam konteks ini, teknik penelitian kualitatif menjadi pendekatan utama, dengan penekanan pada karakteristik yang terdapat dalam data (Jabrohim, 2001).

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 1989). Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan sosiologi sastra yang menekankan aspek kemasyarakatan dalam karya sastra (Kurniasari, Sholehudin, & Setiyono, 2019). Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai hasil respons pengarang terhadap realitas sosial yang diungkapkan melalui karya sastra. Penelitian ini secara khusus menggambarkan masalah-masalah sosial dalam puisi “Pidato Seorang Demonstran” karya Mansur Samin dan respons pengarang terhadap permasalahan tersebut melalui kritik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari puisi “Pidato Seorang Demonstran” karya Mansur Samin, yang mengandung unsur kritik sosial. Data primer berasal langsung dari puisi tersebut, sedangkan data sekunder mencakup berbagai dokumen seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, dan artikel terkait dengan puisi tersebut serta literatur ilmiah tentang metode studi dan teori sosiologi sastra.

Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan tinjauan literatur atau studi literatur, melibatkan pengumpulan data dari artikel ilmiah, laporan akademis, tesis, dan buku terkemuka. Puisi “Pidato Seorang Demonstran” menjadi pusat perhatian dalam pengumpulan data. Teknik baca dan teknik catat digunakan dalam proses pengumpulan data, dengan langkah-langkah yang mencakup membaca puisi secara berulang-ulang, menandai bagian-bagian yang mengandung kritik sosial, dan mencatat unsur-unsur yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan metode *analyst content* atau analisis isi, fokus pada pengidentifikasian dan penafsiran pesan inti karya sastra. Langkah-langkah analisis melibatkan menelaah puisi secara keseluruhan, menulis data yang telah dipersiapkan, mengidentifikasi jenis kritik sosial, cara penyampaian kritik, dan makna tersirat, mengklasifikasikan data ke dalam tabel, memberikan penafsiran terhadap data, dan menyimpulkan bentuk kritik sosial dan cara penyampaian kritik yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Puisi “Pidato Seorang Demonstran” hasil karya Mansur Samin menjadi panggung utama bagi penulis untuk mengungkapkan rasa ketidaksetujuannya terhadap tindakan kekerasan yang diterapkan oleh militer serta perilaku tidak dapat diprediksi yang sering muncul dari para pemimpin. Puisi ini bukan sekadar ungkapan perasaan pribadi, tetapi juga merupakan alat bagi penulis untuk menyuarakan ketidakpuasannya.

Dalam upaya mencapai tujuan ekspresinya, Mansur Samin dengan cermat dan tajam menguraikan berbagai tantangan sosial-ekonomi serta penderitaan yang melanda masyarakat. Dalam kata lain, puisi ini tidak hanya menjadi tempat di mana penulis mengungkapkan ketidaksetujuannya, melainkan juga menjadi cerminan tajam tentang kondisi masyarakat yang dihadapi oleh para individu yang menjalani kesulitan ini. Dalam puisinya, Mansur Samin menjadi suara yang mengartikulasikan penderitaan dan kebutuhan orang banyak.

Selama periode krisis ekonomi atau ketika terjadi penurunan dalam tingkat produksi nasional, terjadi peningkatan harga yang sangat mencolok. Kendati para pejabat pemerintah

sering kali memberikan jaminan-jaminan mengenai normalisasi harga, dalam praktiknya harga-harga cenderung terus meroket atau bahkan tidak mengalami perubahan apa pun. Hal ini mencerminkan realitas pahit yang sering dihadapi masyarakat ketika mereka harus berurusan dengan biaya hidup yang semakin tinggi sementara janji-janji pemerintah tampaknya tidak dijalankan (Alya dkk., 2024; Maulidia, Kurniawan, & Yasin, 2023).

Salah satu faktor yang menjadi akar dari masalah sosial yang dialami oleh individu adalah fenomena di mana pejabat pemerintah lebih mementingkan urusan internasional daripada memperhatikan dan menyelesaikan kesulitan yang ada dalam yurisdiksi mereka sendiri. Ini menciptakan ketidaksetaraan yang semakin meningkat antara tindakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat yang mereka layani.

Ketika menghadapi isu hukum, pihak berwenang sering kali terlibat dalam serangkaian gegap gempita saling menyalahkan, dan media massa sering kali menampilkan individu-individu yang berlebihan dalam memuji para pejabat. Dampak dari hal ini adalah bahwa masyarakat sering kali berada dalam keadaan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, apakah itu fakta atau fitnah, sehingga kebenaran sering kali tersembunyi (Pradita, 2023).

Ketika para pejabat yang telah terpilih untuk mengabdikan kepada masyarakat mulai menjabat dan menerima gaji yang dibiayai oleh pajak masyarakat, terkadang mereka gagal untuk memenuhi janji-janji yang mereka lontarkan selama kampanye. Akibatnya, masyarakat pun berusaha untuk mendorong pertanggungjawaban dengan mengorganisasi protes di kantor-kantor para pejabat ini. Sayangnya, sering kali para demonstran menjadi sasaran tuduhan palsu dan upaya pencemaran nama baik, sementara pemerintah menampik eksistensi janji-janji yang mereka buat.

Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan untuk aktif merespons dan menyuarakan keprihatinan mereka jika tindakan para pejabat yang mereka pilih ternyata tidak sesuai dengan janji-janji yang telah diutarakan. Mansur Samin mengungkapkan kritiknya terhadap pemerintah berdasarkan pengalaman sosio-historis yang telah ia alami, dengan tujuan untuk menarik perhatian mereka yang berada dalam posisi otoritas serta untuk memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat. Melalui puisinya yang berjudul “Pidato Seorang Demonstran”, Mansur Samin memotivasi seseorang untuk tidak hanya menjadi pasif, tetapi juga untuk beraksi dan merespons tegas ketika mereka merasa bahwa tindakan pemerintah tidak adil. Puisinya merupakan panggilan kepada setiap individu untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat yang mereka huni, dan untuk berani menghadapi ketidakadilan yang mereka saksikan.

Masalah-masalah sosial yang digambarkan dalam “Pidato Seorang Demonstran” karya Mansur Samin dicirikan oleh sifatnya yang rumit dan beragam. Masalah-masalah tersebut berdiri sendiri atau saling berhubungan. Kategorisasi masalah sosial ke dalam berbagai aspek tidak bersifat definitif, mengindikasikan bahwa suatu masalah tertentu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek masalah lain berdasarkan masalah yang mendasarinya.

Puisi “Pidato Seorang Demonstran” karya Mansur Samin yang ditulis pada tahun 1966 ini memberikan gambaran dasar mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi di Indonesia pada masa-masa akhir kepemimpinan Soekarno, sebelum berpindah ke tangan Soeharto. Puisi-puisi Mansur Samin tidak hanya merupakan hasil imajinasi, ide, atau gagasan yang memiliki kata-kata yang estetik, tetapi juga menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi dalam realitas sosial. Fenomena yang digambarkan dalam puisi ini adalah tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat yang penuh dengan kekhawatiran dan kesengsaraan, serta suasana politik pada masa pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru.

Berdasarkan hasil penelitian dari masalah-masalah yang dikritik dalam Puisi “Pidato Seorang Demonstran” karya Mansur Samin, ditemukan adanya indikasi kritik sosial dalam

berbagai varian fenomena permasalahan sosial. Varian fenomena tersebut tercakup dalam tiga aspek masalah sosial yaitu masalah dalam aspek kekuasaan, bidang politik, masalah bidang ekonomi, dan masalah bidang sosial budaya.

Terkait dengan aspek dinamika kekuasaan, puisi ini mengungkapkan ketidakpuasan terhadap tindakan kekerasan dan perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak berwenang. Hal ini mencerminkan konflik dalam dinamika kekuasaan antara pemerintah dan rakyat, di mana kekuasaan sering kali digunakan untuk menindas dan merugikan masyarakat. Adapun bait yang mengandung kritik sosial aspek dinamika kekuasaan yakni pada bait pertama, keempat, dan kelima.

Aspek ekonomi mencakup tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Puisi ini menyoroti peningkatan harga selama krisis ekonomi dan ketidakmampuan pejabat pemerintah untuk menjaga harga tetap stabil. Hal ini mencerminkan penderitaan ekonomi yang dialami oleh masyarakat, yang sering kali harus menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat kebijakan yang tidak efektif. Adapun bait-bait yang mengandung kritik sosial terhadap ekonomi adalah bait kedua dan ketiga.

Aspek politik terutama mencakup ketidaksetaraan perhatian pemerintah terhadap masalah internal dan kecenderungan pejabat terpilih untuk gagal memenuhi janji kampanye mereka. Puisi ini juga mengungkapkan konflik politik, saling tuduh antarpejabat, dan upaya pencemaran nama baik, yang akhirnya menciptakan ketidakpercayaan politik. Di samping itu, masalah sosial dalam aspek politik juga menggambarkan bagaimana pengaruh budaya politik yang menciptakan konflik dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Puisi ini menggambarkan bagaimana media sering kali digunakan untuk membangun citra positif para pejabat dan mencemarkan nama baik lawan-lawan politik. Praktik tersebut mencerminkan budaya politik yang sarat dengan pujian berlebihan dan pencemaran nama baik. Hal ini menggambarkan bagaimana budaya politik dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang tindakan pemerintah dan konflik dalam masyarakat. Kritik sosial dalam aspek politik tersebut terdapat dalam bait kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Adapun masalah sosial aspek hak asasi manusia mencakup pelanggaran hak-hak dasar individu yang terjadi sebagai akibat dari tindakan pemerintah dan pejabat yang sewenang-wenang. Puisi ini mencerminkan ketidakadilan terhadap warga negara yang berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka. Hal ini menggambarkan bagaimana pejabat pemerintah sering menggunakan tuduhan palsu dan upaya pencemaran nama baik untuk menekan demonstrasi dan protes warga. Adapun bait yang mengandung kritik sosial terhadap hak asasi manusia adalah bait pertama, keempat, dan kelima.

Kritik yang disampaikan oleh Mansur Samin mencakup berbagai aspek, menunjukkan bahwa satu bait puisi bisa saja merangkum lebih dari satu aspek dari masalah yang menjadi sasaran kritik. Dalam satu bait tersebut, selain merangkum komponen inti dari masalah sosial, bait tersebut juga dapat menggabungkan beberapa aspek lain yang terkait dengan masalah sosial tersebut.

Jenis Kritik Sosial dalam Puisi “Pidato Seorang Demontran” Karya Mansur Samin

Isu-isu sosial yang digambarkan dalam “Pidato Seorang Demontran” karya Mansur Samin sangatlah rumit dan beragam. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat berdiri sendirisendiri atau saling berkaitan. Klasifikasi masalah sosial ke dalam beberapa dimensi tidak bersifat konklusif, yang menunjukkan bahwa masalah tertentu dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi masalah tergantung pada masalah yang mendasarinya. Terdapat kemungkinan untuk mengategorikan masalah tunggal ke dalam beberapa kelompok (Soekanto, 1982).

Isu-isu sosial yang diteliti dalam "Pidato Seorang Demonstran" karya Mansur Samin berkaitan dengan penggambaran komponen-komponen mendasar dari masalah-masalah sosial yang terjadi pada tahun 1960-an selama peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Berdasarkan hasil penelitian terhadap isu-isu yang dikritik dalam "Pidato Seorang Demonstran" karya Mansur Samin, terdapat tanda-tanda kritik sosial dalam berbagai bentuk permasalahan sosial. Beberapa manifestasi dari fenomena tersebut tercakup dalam empat dimensi kesulitan masyarakat, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, tantangan ekonomi, masalah politik, dan masalah hak asasi manusia.

Kritik Sosial terhadap Dinamika Kekuasaan

Secara keseluruhan, puisi ini mencerminkan kritik sosial terhadap berbagai aspek dinamika kekuasaan. Kritik tersebut secara khusus diarahkan pada praktik penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan sikap pasif rakyat dalam menghadapi tindakan penguasa.

Pada tahun 1966, Indonesia telah mengalami serangkaian peristiwa penting, termasuk peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun sebelumnya. G30S menyebabkan ketidakstabilan politik dan perpecahan dalam pemerintahan (Damayanti, 2022). Demonstrasi tanggal 23 Februari 1966 dipicu oleh penolakan terhadap pelantikan kabinet Dwikora yang dilakukan oleh Presiden Sukarno. Mahasiswa dan pelajar ingin kabinet Dwikora dibebaskan dari intervensi menteri-menteri yang terkait dengan G30S, dengan cara memasukkan menteri-menteri yang anti-G30S ke dalam kabinet.

Namun, Presiden Soekarno justru memasukkan lebih banyak menteri yang terkait dengan G30S dalam kabinet Dwikora, yang memperburuk situasi politik dan meningkatkan ketegangan di antara pihak yang mendukung dan menentang pemerintahan. Demonstrasi mahasiswa dan pelajar di depan Gedung Sekretariat Negara ini adalah bentuk protes mereka terhadap tindakan presiden tersebut (Erlina, 2020).

Pada bait pertama, Mansur Samin menggambarkan peristiwa demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang terjadi pada tanggal 23 Februari 1966 di depan Gedung Sekretariat Negara di Jakarta, Indonesia. Demonstrasi ini terjadi sebagai respons terhadap situasi politik yang tegang dan situasi sosial yang sulit pada saat itu. Peristiwa tersebut digambarkan pada larik berikut.

*Mereka telah tembak teman kita
ketika mendobrak sekretariat negara*
(Bait Pertama, Larik Pertama dan Kedua) (Samin, 1971)

Kedua larik tersebut mencerminkan bagaimana demonstrasi mahasiswa dan pelajar, yang awalnya dimulai sebagai upaya protes terhadap pelantikan kabinet yang kontroversial, berakhir dengan tindakan keras dari aparat keamanan yang menembak demonstran. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana dinamika kekuasaan dan konflik politik dapat berdampak pada tindakan represif terhadap rakyat yang berusaha menyuarakan pendapat mereka.

Rakyat Indonesia mengalami kekecewaan yang mendalam terhadap para pemimpin negara selama masa pemerintahan Orba, yang mengakibatkan kekacauan dan keresahan yang signifikan. Puisi Mansur Samin berfungsi sebagai sarana untuk menyadarkan dan mencerahkan masyarakat, menyoroti kondisi bangsa yang semakin terpuruk. Kegagalan dalam memenuhi mandat rakyat dan kemerosotan kekuatan hukum dapat dilihat pada larik berikut.

*sekarang jelas bagi saudara
sampai mana kebenaran hukum di Indonesia*
(Bait Pertama, Larik Ketiga dan Keempat) (Samin, 1971)

Pada larik tersebut, Mansur Samin seolah mempertanyakan tentang keadilan dan hukum di Indonesia. Demonstrasi tersebut membawa kesadaran bahwa tindakan represif dan penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi tanpa pertanggungjawaban. Ini memengaruhi salah satu contoh bagaimana dinamika kekuasaan politik dapat memengaruhi hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat dalam masyarakat (Maulana dkk., 2023).

Pada bait keempat, Mansur Samin juga menggambarkan praktik kontroversial dinamika kekuasaan yang merujuk pada sebuah peristiwa sejarah. Peristiwa tersebut tercantum pada larik berikut.

Di masa gestok rakyat dibunuh
(Bait Keempat, Larik Pertama) (Samin, 1971)

Larik tersebut merujuk pada periode “gestok” atau Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965. Pada saat itu, sekelompok perwira militer yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) mencoba melakukan kudeta militer dengan menculik dan membunuh sejumlah jenderal militer terkemuka pada malam tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 (Adriyanto, 2016).

Sebagai respons terhadap upaya kudeta ini, pasukan militer yang setia kepada pemerintah Soekarno berhasil meredam kudeta tersebut. Namun, setelah kegagalan kudeta, terjadi serangkaian peristiwa penindasan yang melibatkan tindakan pembunuhan dan penghilangan massal terhadap anggota PKI dan pendukungnya. Peristiwa ini adalah bagian dari apa yang dikenal sebagai "Gerakan Anti-PKI." Gerakan inilah yang mengacu pada tindakan represif pemerintah selama periode tersebut di mana rakyat biasa menjadi korban penindasan dan kekerasan.

Kritik Sosial terhadap Ekonomi

Menurut Mansur Samin, situasi ekonomi penduduk Indonesia pada masa itu ditandai dengan kemiskinan dan kesulitan yang ekstrem. Tingkat inflasi melonjak hingga 650%, yang menyebabkan kenaikan harga pangan yang tajam (Hadi, 2016). Akibatnya, banyak orang mengalami kelaparan dan terpaksa mengantre untuk mendapatkan komoditas penting seperti beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk keputusan yang dibuat oleh Suharto-Nasution untuk menaikkan gaji tentara sebesar 500% dan penganiayaan terhadap para pedagang Tionghoa, yang menyebabkan migrasi mereka (Alya dkk., 2024). Karena inflasi, banyak orang Indonesia yang terpaksa hanya mengonsumsi bonggol pisang, umbi-umbian, singkong, dan bahan makanan lain yang tidak dapat dimakan setiap hari. Selain itu, mereka menggunakan kain dari karung sebagai pakaian. Mansur Samin memberikan gambaran tentang peristiwa ini pada bait kedua dan ketiga.

Mansur merasakan dengan kuatnya kompleksitas kondisi negara yang semakin rumit, di mana ketidakbebasan merajalela dalam berbagai aspek kehidupan. Rakyat seakan dibungkam oleh kebohongan para penguasa, membuat mereka terjebak dalam situasi yang semakin sulit. Terlebih lagi, ketika rakyat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, para penguasa dan pemimpin justru terlihat sibuk dengan urusan mereka yang

sepele, seperti memilih jas dan dasi yang cocok untuk perjalanan ke luar negeri. Ketidakpedulian ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin memburuk, dengan pemimpin-pemimpin yang mengutamakan kepentingan pribadi mereka sementara rakyat biasa terdampak oleh kesulitan ekonomi yang semakin meningkat. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi yang muncul dalam dinamika kekuasaan, di mana kebijakan cenderung hanya menguntungkan elite politik dan ekonomi, sedangkan rakyat terpinggirkan (Mugiyanto, 2022). Kondisi tersebut digambarkan oleh Mansur secara tersirat pada larik berikut.

*Ketika kesukaran tambah menjadi
para menteri sibuk ke luar negeri*
(Bait Kedua, Larik Pertama dan Kedua) (Samin, 1971)

Setelah itu, puisi ini dengan jelas menggambarkan situasi negara yang memburuk dan meningkatnya keprihatinan dalam kehidupan masyarakat. Namun, para pejabat negara tidak menganggap hal ini sebagai kesulitan. Sebaliknya, mereka lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau politik mereka, yang mengarah pada lonjakan korupsi. Dalam situasi seperti itu, rakyat justru bungkam dan hanya diam ketika menyaksikan situasi buruk tersebut. Hal tersebut secara jelas diungkapkan Mansur Samin dalam larik berikut.

*tapi korupsi tetap meraja sebab
percaya keadaan berubah
rakyat diam saja*
(Bait Kedua; Larik Pertama dan Kedua) (Samin, 1971)

Selanjutnya, pada bait ketiga, Mansur Samin menunjukkan defisit dalam sektor ekonomi dan produksi dalam negeri yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Ini menggambarkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh rakyat. Kendati para pejabat pemerintah sering kali memberikan jaminan-jaminan mengenai normalisasi harga, dalam praktiknya harga-harga cenderung terus meroket atau bahkan tidak mengalami perubahan apa pun. Hal ini mencerminkan realitas pahit yang sering dihadapi masyarakat ketika mereka harus berurusan dengan biaya hidup yang semakin tinggi sementara janji-janji pemerintah tampaknya tidak dijalankan, seperti yang tercantum dalam larik berikut.

*Ketika produksi negara kosong para
pemimpin asyik ngomong*
(Bait Ketiga; Larik Pertama dan Kedua) (Samin, 1971)

Kritik Sosial terhadap Politik

Puisi “Pidato Seorang Demonstran” menggambarkan secara mendalam kompleksitas masalah politik yang melanda masa Orde Lama di Indonesia. Puisi ini menyoroti berbagai aspek penting dalam politik pada periode tersebut. *Pertama*, puisi menunjukkan bahwa masa tersebut ditandai oleh ketidakstabilan politik yang signifikan, di mana terjadi perubahan pemerintahan serta perang saudara yang menciptakan ketidakpastian yang melanda rakyat Indonesia. *Kedua*, puisi mengungkapkan kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, terutama dalam konteks represi terhadap rakyat dan penindasan kelompok tertentu. *Keempat*, kritik terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan politik juga menjadi sorotan dalam puisi ini, dengan menyoroti ketidaksetaraan ekonomi antara elite politik dan rakyat serta kebijakan yang dianggap tidak adil. *Kelima*, korupsi politik merupakan isu krusial yang

ditekankan dalam puisi, menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan pemerintahan, korupsi masih merajalela. *Keenam*, puisi ini juga mengungkapkan ketidakresponsifan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat, terutama dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Para pemimpin dianggap lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau politik mereka daripada kepentingan rakyat. Dengan demikian, puisi “Pidato Seorang Demonstran” memberikan gambaran yang komprehensif tentang situasi politik yang rumit dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia selama masa Orde Lama.

Memaknai bait keempat, pengarang menggambarkan sebuah peristiwa yang dikenal dengan Gestok, atau Gerakan Satu Oktober seperti yang ada pada larik pertama berikut.

Di masa gestok rakyat dibunuh
(Bait Keempat, Larik Pertama) (Samin, 1971)

Larik tersebut merujuk pada peristiwa Gestapu, atau Gerakan September Tiga Puluh yang terjadi pada tahun 1965. Gestapu adalah sebuah kudeta militer yang bertujuan untuk merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno (Hartono, Huda, & Arseat, 2022). Dalam peristiwa ini, banyak anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) dan para simpatisannya diburu dan dibunuh. Gerakan ini juga melibatkan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dianggap sebagai musuh oleh militer. Larik ini mengkritik keras tindakan represif terhadap rakyat yang dianggap berkonotasi komunis.

Selanjutnya, Mansur Samin mencerminkan kondisi politik yang kacau selama masa itu. Para pejabat pemerintahan saling menyalahkan dan menuding satu sama lain sebagai dalang atau simpatisan PKI, menciptakan ketidakstabilan politik dan konflik internal dalam pemerintah. Ini menunjukkan kekacauan dalam pemerintahan pada saat itu, seperti yang digambarkan pada larik berikut.

para menteri saling menuduh
(Bait Keempat, Larik Kedua) (Samin, 1971)

Kritik yang disampaikan Mansur Samin dalam larik tersebut menggarisbawahi ketidakstabilan politik, ketidakpercayaan di antara pejabat pemerintahan, dan hilangnya kohesi dalam kepemimpinan negara.

Mansur Samin juga menggambarkan perilaku oportunistik di kalangan masyarakat yang mencoba memanfaatkan kekacauan politik untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka disebut sebagai “kaum penjilat”, yang merujuk kepada orang-orang yang mencoba meraih keuntungan dengan bersekongkol atau menjilati (merayu) para penguasa. Kondisi tersebut digambarkan pada larik berikut.

kaum penjilat mulai beraksi
(Bait Keempat, Larik Ketiga) (Samin, 1971)

Melalui larik tersebut, Mansur Samin mengkritik ketidakjujuran dan perilaku yang tidak etis dalam politik, dengan orang-orang yang hanya peduli pada keuntungan pribadi mereka, tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Kritik Sosial terhadap Hak Asasi Manusia

Masyarakat Indonesia masih sering melakukan atau menjadi korban pelanggaran HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM tidak hanya terjadi pada masa sekarang, tetapi juga pernah

terjadi pelanggaran HAM di masa lalu (Saputra & Surajiman, 2021). Dalam puisi “Pidato Seorang Demonstran” menyoroti beberapa isu pelanggaran HAM yang terjadi pada periode 1960-an, seperti pembunuhan selama peristiwa “Gestok” ketidakpedulian pemerintah terhadap penderitaan rakyat, merajalelanya korupsi, kekerasan politik, dan ketidakadilan dalam menghargai kontribusi generasi sebelumnya. Kritik Sosial terhadap HAM yang terdapat dalam puisi “Pidato Seorang Demonstran” antara lain sebagai berikut.

Pada bait pertama, Mansur Samin merujuk pada dua aspek yang sangat serius dalam sejarah, yakni tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pembunuhan terhadap rakyat sendiri. Pada masa tersebut, kekerasan politik serta pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan terhadap warga sipil yang mencoba memprotes pemerintah, sering terjadi. Peristiwa tersebut ditunjukkan Mansur Samin pada larik berikut.

*Mereka telah tembak teman kita
ketika mendobrak sekretariat negara*
(Bait Pertama, Larik Pertama dan Kedua) (Samin, 1971)

Kedua larik tersebut merupakan pernyataan kritik dari Mansur Samin sebagai bentuk ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah yang sangat otoriter. Ketika rakyat berusaha memprotes serta menyuarakan aspirasi mereka, sering kali tindakan keras seperti penembakan digunakan untuk membungkam perlawanan (Aulianisa & Aprilia, 2019; Jubaedah, 2019).

Selanjutnya, Mansur Samin merenungkan pertanyaan yang dalam dirinya terdapat keraguan mendalam tentang sejauh mana sistem hukum di Indonesia pada masa tersebut dapat memberikan keadilan dan memelihara hak asasi manusia. Puisi ini mencerminkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan yang sering dianggap tidak mampu secara efektif menghukum para pelaku pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang tercantum pada bait berikut.

*sekarang jelas bagi saudara
sampai mana kebenaran hukum di Indonesia*
(Bait Pertama, Larik Ketiga dan Keempat) (Samin, 1971)

Kedua larik tersebut menggarisbawahi ketidakpastian hukum dan keraguan akan kemampuan sistem hukum dalam mewujudkan keadilan. Mansur Samin mengkritik bagaimana hak asasi manusia sering kali diabaikan dan tidak dihormati, bahkan dalam konteks hukum.

Pada bait kedua, Mansur Samin mengkritik korupsi yang merajalela pada masa itu. Korupsi dianggap merugikan hak asasi manusia karena menguras sumber daya dan kekayaan negara, menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta merugikan hak-hak dasar rakyat. Permasalahan tersebut tercantum pada bait berikut.

*Ketika kesukaran tambah menjadi
para menteri sibuk ke luar negeri tapi
korupsi tetap meraja*
(Bait Kedua; Larik Pertama, Kedua dan Ketiga) (Samin, 1971)

Larik tersebut merupakan penggambaran situasi sosial yang semakin memburuk di Indonesia selama masa Orde Lama. Rakyat Indonesia menghadapi tantangan ekonomi, sosial,

dan politik yang semakin meningkat, termasuk tingginya tingkat inflasi, kemiskinan yang merajalela, dan ketidaksetaraan yang semakin memburuk.

Pada larik tersebut, Mansur Samin mengkritik perilaku pemerintah yang tampaknya lebih fokus pada urusan internasional daripada masalah dalam negeri. Para pemimpin cenderung lebih peduli pada masalah luar negeri dan terkesan mengabaikan masalah-masalah kritis yang dihadapi oleh rakyatnya. Hal ini dapat diartikan sebagai kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab mereka untuk menjaga kepentingan rakyat dan melindungi hak asasi manusia.

Kritik juga diungkapkan oleh Mansur Samin terhadap tingginya tingkat korupsi dalam pemerintahan dan birokrasi pada masa itu. Meskipun rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, praktik korupsi tetap merajalela, dan uang negara disalahgunakan oleh para pejabat pemerintah. Praktik-praktik korupsi ini tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga melanggar hak asasi manusia rakyat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, puisi “Pidato Seorang Demonstran” karya Mansur Samin mencakup empat dimensi kritik sosial, yakni 1) penyalahgunaan kekuasaan, 2) masalah ekonomi, 3) masalah politik, dan 4) pelanggaran hak asasi manusia. Isu-isu utama yang tercakup dalam keempat komponen ini adalah sebagai berikut. Dalam dimensi penyalahgunaan kekuasaan, kritik sosial diarahkan pada isu tindakan represif yang dilakukan oleh militer. Dalam dimensi ekonomi, kritik sosial diarahkan pada isu krisis ekonomi, inflasi, peningkatan harga, dan ketidaksetaraan ekonomi. Dalam dimensi politik, kritik sosial diarahkan pada isu di mana pejabat lebih memperhatikan urusan internasional dibandingkan urusan domestik. Dalam dimensi pelanggaran hak asasi manusia, kritik sosial diarahkan pada penembakan terhadap warga sipil yang memprotes pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Terima kasih kepada seluruh staf dan dosen yang telah memberikan waktu, pengetahuan, dan sumber daya untuk membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang pendidikan bahasa Indonesia dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M., Muthi'ah, M., & Tsuraya, A. S. (2022). Social criticism in Oliver Goldsmith's *She Stoops to Conquer*. *Rainbow: Journal of Literature, Linguistics and Culture Studies*, 11(1), 27–33. <https://doi.org/10.15294/rainbow.v11i1.52804>
- Adriyanto, A. (2016). Kontroversi Keterlibatan Soeharto dalam Penumpasan G30S/PKI 1965. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.31851/kalpataru.v2i2.1591>
- Alya, D., Yanti, F., Rahman, M. R. R., & Ribawati, E. (2024). Krisis Ekonomi dan Kondisi Masyarakat Tahun 1965-1966. *Sindoro Cendikia Pendidikan*, 5(3), 1–10.
- Anwarsani, A., Erniwati, E., Mahdalena, M., Apianson, A., Najmi, H., Suwartini, S., ... Fadillah, H. (2023). Mengajarkan Pancasila Melalui Puisi Berjudul “Pancasila Dasar Negara” Karya: Misnawati. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 1(3), 44–58.

- Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2019). Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat? *Padjadjaran Law Review*, 7(2), 26–37.
- Damayanti, W. (2022). Eksistensi Gerakan Mahasiswa Tahun 1966 sebagai Upaya Tumbangkan Kepemimpinan Soekarno. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2(2), 24–35. <https://doi.org/10.22437/jejak.v2i2.21063>
- Endraswara, S. (2021). *Metodologi Penelitian Fenomenologi Sastra*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Erlina, T. (2020). Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia dalam Proses Peralihan Kepemimpinan Nasional Tahun 1965-1968. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 7(1), 95–102. <https://doi.org/10.25157/wa.v7i1.3253>
- Hadi, S. S. (2016). Laju Inflasi Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia dan Cara Penanggulangannya. *Perspektif: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 14(2), 86–95.
- Hajrawati. (2017). Aspek Sosial Dalam Naskah Drama Bulan dan Kerupuk Karya Yusef Muldiyana (Kajian Sosiologi Sastra Ian Watt). *Skripsi*. Universitas Negeri Makassar.
- Hartono, Y., Huda, K., & Arseat, R. L. (2022). Konstruksi Materi dan Praksis Pembelajaran Sejarah Kontroversial G-30-S/PKI Era Post Truth. *Refleksi: Jurnal Riset dan Pendidikan*, 1(1), 9–16. <https://doi.org/10.25273/refleksi.v1i1.13970>
- Indrastuti, N. S. K. (2019). Nasionalisme dalam Bingkai Kritik Sosial: Kajian Sosiopragmatik terhadap Puisi Indonesia Modern. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 7(1), 105–118. <https://doi.org/10.22146/poetika.v7i1.45421>
- Jabrohim, E. (2001). *Metodologi Penelitian Sastra*. Jakarta: Hanindita.
- Jubaedah, S. (2019). Gerakan Mahasiswa (Kajian tentang Peranan Mahasiswa Universitas Trisakti pada Mei 1998 dalam Proses Pergantian Kekuasaan Orde Baru). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 18–40. <https://doi.org/10.36706/jc.v8i2.9245>
- Kholis, N. (2021). Kritik Sosial Dalam 4 Puisi Anis Syusan (Kajian Sosiologi Sastra Alan Swingewood). *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Krisna, A. A. P., & Qur'ani, H. B. (2021). Kritik Sosial dalam Puisi “Karangan Bunga” Karya Taufik Ismail. *Jurnal Edukasi Khatulistiwa: Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2), 109–119. <https://doi.org/10.26418/ekha.v4i2.44480>
- Kurniasari, L. A., Sholehudin, M., & Setiyono, J. (2019). Analisis Sosiologi Sastra Novel Sunyi Nirmala Karya Ashadi Siregar dan Hubungannya dengan Pembelajaran di SMA. *Jurnal Genre (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya)*, 1(1), 46–51. <https://doi.org/10.26555/jg.v1i1.1061>
- Laili, A. N., & Qurani, H. B. (2022). Kritik Sosial dalam Puisi “Jakarta 17 Agustus 45 Dini Hari” Karya Sitor Situmorang. *BASINDO: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya*, 6(1), 100–107. <https://doi.org/10.17977/um007v6i12022p100107>
- Maulidia, D. N., Kurniawan, M. R., & Yasin, M. (2023). Faktor-Faktor Krisis dan Dampak Krisis yang Pernah Terjadi di Indonesia sehingga Mengakibatkan Kerapuhan Fundamental. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 181–193. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1619>
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mugiyanto, M. (2022). Hubungan Oligarki Kekuasaan dengan Politik Hukum Penguasa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.54>

- Pradita, D. (2023). Waduk Gajah Mungkur dalam Surat Kabar: Propaganda dan Wacana Keberhasilan Pemerintah Orde Baru. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.22515/isnad.v4i02.7479>
- Maulana, R., Septiyana, D., Ginting, A. F. Br., & Pardede, S. A. (2023). Rahasia Terungkap: Menganalisis Dinamika Keamanan Pers pada Masa Orde Baru (1966-1998). *Histeria: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 2(2), 67–74.
- Rohma, W. S. T., & Qur'ani, H. B. (2022). Kritik Sosial dalam Puisi “Berikan Aku Keadilan” Karya Fitri Nganthi Wani dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sastra. *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra*, 11(2), 244–257. <https://doi.org/10.26499/jentera.v11i2.3361>
- Samin, M. (1971). *Perlawanan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saputra, O., & Surajiman, S. (2021). Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Kasus Timor Timur. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(1), 122–133. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5789>
- Semi, M. A. (1993). *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa.
- Simanjuntak, H., Saragih, E. L. L., & Sirait, L. S. (2022). Analisis Nilai Motivasi pada Kumpulan Puisi “Di Kedai Teh Ah Mei” Karya Nezar Patria. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(9), 3566–3569. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.900>
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.